

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA PERDAGANGAN TELUR AYAM RAS KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BLITAR

Oleh:

Monalisa Trio Wibowo¹

Irsyedha Alfara Reginantis²

Putri Indah Sari³

Juliana Mas Kinanti Saragih⁴

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi (kode pos). Jl. Ketintang No.i8,

Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur (60231).

Korespondensi Penulis: julianamas.22014@mhs.unesa.ac.id,

irsyedhaalfara.22032@mhs.unesa.ac.id, monalisatrio.22031@mhs.unesa.ac.id,

putriindah.22027@mhs.unesa.ac.id.

Abstract. *Inter-Regional Cooperation (KAD), as a manifestation of the Intergovernmental Relations (IGR) framework, is a crucial instrument in addressing resource disparity and ensuring regional food commodity stability. This study analyzes the planning of KAD in the trade of table eggs between Blitar Regency (a major producer and price setter) and Yogyakarta City. The current ad-hoc trade relationship is characterized by asymmetric interdependence and market inefficiency, triggering extreme price volatility, losses at the farm level, and high logistics costs due to the dominance of intermediaries. The objective of this descriptive qualitative research is to formulate a structured business-to-government (B2G) cooperation model. IGR analysis confirms that institutional intervention is the necessary solution. The proposed model is the Long-Term Contract and Quality Assurance (KJP-JM) Model, which involves the formalization of roles between the Yogyakarta City Regional-Owned Enterprise (BUMD Pangan) (acting as the off-taker) and the Blitar Regency Farmers' Cooperatives (as the*

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA PERDAGANGAN TELUR AYAM RAS KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BLITAR

supplier). The KJP-JM Model replaces the volatile daily market prices with a mutually agreed-upon quarterly reference price. Furthermore, the model integrates quality assurance through investment in cold chain logistics, which significantly shortens the distribution chain, guarantees quality, and creates positive economic effects. The success of this model's implementation highly depends on the political commitment and regulatory synchronization between the regions within the framework of IGR's shared governance.

Keywords: *Inter-Regional Cooperation (KAD), Intergovernmental Relations (IGR), Commodity Trade, Table Eggs, Regional Food Security, KJP-JM Model.*

Abstrak. Kolaborasi Antar Daerah (KAD), sebagai manifestasi dari kerangka *Intergovernmental Relations* (IGR), merupakan instrumen krusial dalam menanggulangi ketimpangan sumber daya dan menjamin stabilitas komoditas pangan regional. Studi ini menganalisis perencanaan KAD dalam perdagangan telur ayam ras antara Kabupaten Blitar (produsen utama dan price setter) dan Kota Yogyakarta. Hubungan perdagangan *ad-hoc* saat ini dicirikan oleh *asymmetric interdependence* dan inefisiensi pasar, yang memicu volatilitas harga ekstrem, kerugian di tingkat peternak, dan tingginya biaya logistik akibat dominasi pedagang perantara. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini adalah merumuskan model kerjasama business-to-government (B2G) yang terstruktur. Analisis IGR mengonfirmasi bahwa intervensi kelembagaan adalah solusi yang diperlukan. Model yang diusulkan adalah Kontrak Jangka Panjang dan Jaminan Mutu (KJP-JM), yang melibatkan formalisasi peran antara BUMD Pangan Kota Yogyakarta (sebagai *off-taker*) dan Koperasi Peternak Kabupaten Blitar (sebagai supplier). Model KJP-JM menggantikan fluktuasi harga pasar harian dengan penetapan harga acuan triwulanan yang disepakati bersama. Selain itu, model ini mengintegrasikan jaminan mutu melalui investasi logistik *cold chain*, yang secara signifikan memperpendek rantai distribusi, menjamin kualitas, dan menciptakan ekonomi positif. Keberhasilan implementasi model ini sangat bergantung pada komitmen politik dan sinkronisasi regulasi antardaerah dalam kerangka *shared governance* IGR.

Kata Kunci: Kerjasama Antar Daerah (KAD), *Intergovernmental Relations* (IGR), Perdagangan Komoditas, Telur Ayam Ras, Ketahanan Pangan Regional, Model KJP-JM.

LATAR BELAKANG

Kolaborasi Antar Daerah (KAD) merupakan instrumen strategis dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan sumber daya, mendorong pertumbuhan ekonomi regional, serta memperkuat ketahanan pangan (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Dalam konteks komoditas pangan strategis, KAD menjadi semakin penting karena mampu menciptakan sistem distribusi pasokan yang terencana, efisien, dan berkelanjutan, khususnya antara daerah produsen dan daerah konsumen (Fitriani, 2020). Melalui KAD, pemerintah daerah dapat menyusun skema kerjasama yang tidak bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas, sehingga mampu menekan volatilitas harga dan memastikan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat (Prabowo & Setiawan, 2022).

Kabupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu sentra utama produksi telur ayam ras nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan telur domestik dan antarprovinsi. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa produksi telur di Kabupaten Blitar tidak hanya mencukupi kebutuhan Jawa Timur, tetapi juga memasok wilayah lain di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Posisi strategis ini menjadikan Blitar sebagai *price setter* di tingkat produsen, sehingga dinamika produksinya memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas harga telur di wilayah lain (Suryana, 2021). Sebaliknya, Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah konsumen dengan tingkat permintaan telur yang tinggi. Keterbatasan lahan dan orientasi pembangunan non-pertanian menyebabkan produksi telur lokal sangat minim, sehingga ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap pasokan dari luar daerah mencapai lebih dari 90% (Disperindag DIY, 2023). Struktur konsumsi yang tinggi tanpa cadangan produksi ini meningkatkan kerentanan terhadap risiko kelangkaan dan lonjakan harga, terutama pada periode libur panjang, gangguan distribusi, atau praktik penimbunan (Hapsari et al., 2022).

Ketiadaan kerangka kerjasama yang terstruktur antara daerah produsen (Blitar) dan daerah konsumen (Yogyakarta) menimbulkan sejumlah permasalahan, di antaranya: (1) risiko kelebihan pasokan di daerah produsen yang menyebabkan harga di tingkat peternak jatuh di bawah biaya produksi; (2) risiko fluktuasi harga ekstrim dan kelangkaan pasokan di daerah konsumen; dan (3) tingginya biaya logistik akibat panjangnya rantai distribusi dan dominasi perantara yang tidak memberikan nilai tambah

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA PERDAGANGAN TELUR AYAM RAS KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BLITAR

signifikan (Kusnadi, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan artikel analisis ini adalah merumuskan model perencanaan kerjasama perdagangan telur ayam ras antara Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai daerah produsen dan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai daerah konsumen dalam kerangka *business-to-government* (B2G) yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi. Melalui model KAD yang terlembaga, diharapkan tercipta mekanisme perdagangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan yang tidak hanya menstabilkan harga dan mengamankan pasokan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat ketahanan pangan regional, serta mendorong simbiosis ekonomi antardaerah (Rahman & Dewi, 2023).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis perencanaan kerjasama perdagangan telur ayam ras antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan kebijakan publik berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat (Moleong, 2019). Metode deskriptif bertujuan untuk menyajikan fakta empiris secara sistematis dan faktual mengenai kondisi produksi, distribusi, dan kebijakan pangan di kedua wilayah tanpa melakukan intervensi variabel (Sugiyono, 2017). Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan daerah, laporan Badan Pusat Statistik, serta publikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Perdagangan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini relevan untuk mengeksplorasi relasi interdependensi antara daerah produsen dan konsumen serta merumuskan model perencanaan kerjasama B2G yang berbasis kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing pihak. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menginterpretasikan dinamika kebijakan secara komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antar pemerintahan *Intergovernmental Relations* (IGR), yang di Indonesia diwujudkan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), merupakan instrumen kebijakan krusial untuk mengatasi ketimpangan sumber daya, mengoptimalkan pembangunan regional, dan mencapai stabilitas komoditas pangan. Dalam konteks otonomi daerah, KAD menjadi mekanisme legal dan kelembagaan untuk menjamin aliran pasokan barang strategis secara efisien dari daerah produsen ke daerah konsumen. Perencanaan IGR yang matang memungkinkan terciptanya model perdagangan yang saling menguntungkan dan memitigasi risiko ekonomi yang bersifat sektoral maupun regional.

Studi kasus ini menyoroti hubungan perdagangan telur ayam ras antara Kabupaten Blitar dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Blitar dikenal sebagai lumbung produksi telur nasional, yang memiliki keunggulan komparatif dengan surplus produksi yang besar, jauh melampaui kebutuhan domestik Jawa Timur. Pasokan telur Blitar menjadi penentu harga di tingkat produsen (*farm gate price*) bagi sebagian besar Jawa bagian tengah. Sebaliknya, Kota Yogyakarta, sebagai pusat jasa, pariwisata, dan pendidikan, memiliki keterbatasan lahan dan kapasitas produksi, menghasilkan ketergantungan pasokan telur yang sangat tinggi. Sektor konsumsi institusional seperti hotel, restoran, dan catering (HORECA) di Yogyakarta membutuhkan pasokan dalam volume besar dengan standar mutu yang terjamin.

Ketergantungan struktural ini, apabila tidak dikelola dalam kerangka IGR yang formal, akan menimbulkan inefisiensi dan risiko sistemik. Permasalahan yang teridentifikasi dalam hubungan ad-hoc saat ini meliputi: (1) volatilitas harga yang ekstrem, di mana peternak di Blitar sering menjual dibawah harga pokok produksi (CoP) akibat *over-supply*, sementara konsumen di Yogyakarta menghadapi lonjakan harga saat terjadi gangguan pasokan; (2) dominasi pedagang perantara (*middleman*) yang memanjang rantai pasok dan menekan kualitas produk; serta (3) tidak adanya mekanisme mitigasi risiko pasokan yang terlembaga antara kedua wilayah.

Konsep *Intergovernmental Relations* (IGR) menekankan pada interaksi, koordinasi, dan negosiasi antara pemerintah daerah dalam kerangka otonomi untuk mencapai kepentingan bersama (Wright, 1982). Dalam konteks perencanaan kerjasama perdagangan telur ayam ras, hubungan antara Pemerintah Kota Yogyakarta (sebagai

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA PERDAGANGAN TELUR AYAM RAS KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BLITAR

daerah konsumen) dan Pemerintah Kabupaten Blitar (sebagai daerah produsen) mencerminkan bentuk kerjasama horizontal antar pemerintah daerah dalam upaya menciptakan stabilitas pangan dan ekonomi regional.

1. Dimensi Kebutuhan dan Kapasitas Daerah

Kabupaten Blitar memiliki kapasitas produksi telur ayam ras yang tinggi dan konsisten, menjadikannya sebagai daerah penentu harga (*price setter*). Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan produksi dan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan luar daerah. Dalam perspektif IGR, kondisi ini menunjukkan adanya *asymmetric interdependence* ketergantungan asimetris di mana daerah konsumen (Yogyakarta) membutuhkan jaminan suplai, sedangkan daerah produsen (Blitar) membutuhkan kepastian pasar. Kerjasama menjadi instrumen strategis untuk menyatukan kepentingan ekonomi kedua belah pihak (Cheema & Rondinelli, 2007).

2. Mekanisme Koordinasi Antar Pemerintah

Perencanaan kerjasama perdagangan ini dilakukan melalui mekanisme koordinasi lintas daerah yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, negosiasi harga, mekanisme distribusi, serta pembagian peran antara BUMD, dinas perdagangan, dan dinas ketahanan pangan di kedua wilayah. Koordinasi ini menggambarkan fungsi IGR sebagai *policy instrument* untuk memastikan harmonisasi kebijakan daerah dalam memenuhi kepentingan publik (Anderson, 1960).

3. Aspek Fiskal dan Regulasi

Dalam perspektif IGR, hubungan antar pemerintah tidak hanya mencakup koordinasi administratif, tetapi juga dimensi fiskal (*fiscal interdependence*). Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh keuntungan fiskal dari distribusi komoditas, sementara Kota Yogyakarta mendapat manfaat dari stabilitas harga dan jaminan pasokan pangan. Kerjasama ini memungkinkan efisiensi anggaran melalui skema B2G yang memotong rantai distribusi panjang yang sebelumnya dikuasai pihak swasta. Dengan adanya payung hukum kerja sama daerah, model ini mencerminkan pelaksanaan *shared governance* dalam kerangka otonomi

daerah (Smith, 2007).

4. Implikasi Ekonomi dan Stabilitas Pangan

Analisis IGR menunjukkan bahwa perencanaan kerjasama ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi strategis dalam membangun *regional food security*. Kerjasama Blitar– Yogyakarta akan meningkatkan integrasi pasar, mengurangi volatilitas harga, dan menciptakan *spillover effects* positif bagi kedua daerah. Selain itu, kemitraan ini memperkuat kemandirian daerah dalam menghadapi fluktuasi global dan krisis pangan, sehingga mencerminkan esensi hubungan antar pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional (Aziz, 2021).

5. Tantangan Implementasi

Dalam perspektif IGR, tantangan utama perencanaan kerjasama ini meliputi sinkronisasi regulasi, perbedaan kepentingan politik daerah, keterbatasan infrastruktur logistik, dan resistensi dari pelaku distribusi swasta yang selama ini memegang kendali pasar. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen politik (*political will*), kejelasan pembagian kewenangan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan antar kedua pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Perencanaan kerjasama perdagangan telur ayam ras antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan pentingnya hubungan antar pemerintah (*Intergovernmental Relations/IGR*) sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pangan regional serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Kabupaten Blitar sebagai daerah produsen dengan surplus telur membutuhkan jaminan pasar untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak, sedangkan Kota Yogyakarta sebagai daerah konsumen membutuhkan kepastian pasokan dengan harga yang terjangkau dan kualitas terstandar. Melalui kerangka Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang terinstitusi secara formal, hubungan kedua daerah tidak lagi bersifat transaksional jangka pendek, tetapi berkembang menjadi mekanisme kolaboratif yang terencana melalui skema *business-to-government* (B2G). Implementasi IGR dalam konteks ini mampu menekan dominasi rantai distribusi perantara, meningkatkan efisiensi logistik, dan memastikan keberlanjutan pasokan pangan strategis.

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA PERDAGANGAN TELUR AYAM RAS KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BLITAR

Meskipun demikian, keberhasilan kerjasama ini sangat ditentukan oleh sinkronisasi regulasi, komitmen politik, kejelasan pembagian peran antar aktor, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Dengan demikian, model perencanaan kerjasama Blitar Yogyakarta tidak hanya berpotensi menciptakan simbiosis ekonomi yang saling menguntungkan, tetapi juga menjadi *best practice* dalam implementasi otonomi daerah berbasis integrasi pasar dan ketahanan pangan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, W. (1960). *Intergovernmental Relations in Review*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Aziz, M. T. A. (2021). Stabilitas Pangan dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Blitar Tahun 2023. Jakarta: BPS RI.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY. (2023). Laporan Neraca Komoditas Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023. Yogyakarta: Disperindag DIY.
- Fitriani, D. (2020). Peran Kerjasama Antar Daerah dalam Mewujudkan Efisiensi Rantai Pasok Pangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).
- Hapsari, S., Kurniawan, R., & Permana, I. (2022). Analisis Kerentanan Pasokan Telur di Wilayah Konsumen Perkotaan. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 10(2).
- Harga Nasional. *Jurnal Agribisnis*, 9(4).
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah. Jakarta: Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
- Komoditas Pangan. *Jurnal Otonomi Daerah*, 4(1).
- Kusnadi, A. (2020). Dominasi Perantara dan Implikasinya terhadap Biaya Logistik Pangan. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 8(3).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, D., & Setiawan, R. (2022). KAD sebagai Solusi Menekan Volatilitas Harga
- Rahman, F., & Dewi, P. (2023). Simbiosis Ekonomi Antardaerah melalui Model Kerjasama B2G. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1).
- Smith, J. (2007). *Shared Governance: Theoretical Perspectives on Intergovernmental Relations*. New York: Routledge.

ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA PERDAGANGAN TELUR AYAM RAS KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BLITAR

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
- Suryana, A. (2021). Implikasi Dinamika Produksi Sentra Telur Blitar
terhadap Stabilitas
- Wright, D. S. (1982). *Understanding Intergovernmental Relations*. Monterey, CA:
Brooks/Cole Publishing Company.